



Judul : Deflasi Beruntun DPR Ingatkan Pemerintah
Tanggal : Kamis, 05 September 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 7

Deflasi Beruntun DPR Ingatkan Pemerintah

LPEM UI memperkirakan 8,5 juta orang kelas menengah sudah turun kelas dalam beberapa bulan terakhir. Langkah konkret pemerintah mendesak dibutuhkan.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilhama@mediaindonesia.com

ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai fenomena deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir bukan hal sepele. Pasalnya, itu dapat mengindikasikan adanya penurunan permintaan, atau melambatnya tingkat konsumsi masyarakat.

"Ini perlu diwaspadai. Penyebab terjadinya deflasi adalah permintaan barang turun, sedangkan produksi meningkat. Permintaan turun bisa disebabkan terjadinya pelambatan kegiatan ekonomi yang kemudian berdampak ke penghasilan yang turun sehingga jumlah uang beredar pun menjadi berkurang," ujarnya, kemarin.

Ia mengingatkan pemerintah untuk terus mencermati perkembangan terkini dari kemampuan konsumsi masyarakat. Jika pelambatan terus terjadi dan dibiarkan, dampak ke perekonomian akan cukup terasa. Terlebih, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dari pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika konsumsi rumah tangga turun, itu akan menekan angka pertumbuhan ekonomi," tutur Anis.

"Kemudian dari sisi investasi, pelemahan permintaan juga menjadi sinyal peringatan karena investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi baru atau ekspansi usaha jika permintaan melemah," tambah politikus PKS tersebut.

Ia mengutip data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang memperkirakan 8,5 juta orang kelas menengah turun kelas. Hal itu menunjukkan kian turunnya pendapatan kelas menengah yang menyebabkan turunnya daya beli kelompok itu dalam beberapa bulan terakhir.

"Bahkan mereka terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," terang Anis.

Ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak rambatan yang ditimbulkan deflasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun panjang.

"Dalam jangka pendek, perlu segera merumuskan perlindungan sosial bagi kelas menengah untuk konsumsi, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dalam jangka panjang, mempertimbangkan kembali kenaikan PPN tahun depan dan merevisi kembali UU Cipta Kerja yang tidak berpihak pada pekerja,"

jelas Anis.

Pandangan senada juga disampaikan anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin. Politikus Partai Golkar itu mendesak pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menyelamatkan daya beli masyarakat. Itu dapat dilakukan dengan mendorong stabilitas pasokan dan harga barang di level konsumen. Tujuannya produksi yang melimpah dapat terserap.

"Peran subsidi dan bantuan sosial juga harus dioptimalkan untuk menopang konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," kata Puteri.

Ia mengingatkan, ketika masyarakat mulai membatasi konsumsi, atau tak lagi mampu berbelanja, gairah ekonomi akan tersendat.

"Apabila permintaan melemah, tentu juga berimbas pada sisi penawaran. Terutama memukul kinerja sektor manufaktur. Terlebih, saat ini angka *purchasing managers' index* (PMI) manufaktur juga melemah ke level 48,9," ujarnya.

Butuh stimulus

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan penurunan kemampuan daya beli masyarakat tercermin pada berkurangnya konsumsi pangan sekunder.

"Memang sementara ini fokus masyarakat adalah ke pangan pokok, sementara pangan sekunder agak berkurang. Ini yang jadi tantangan kita," ujarnya.

Penurunan konsumsi itu, lanjut

Adhi, perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Secara spesifik, hal tersebut akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan industri makanan dan minuman di Tanah Air.

Ia menilai kemampuan konsumsi masyarakat mesti dipelihara dan ditingkatkan agar perekonomian bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Karena itu, ia berharap pengambil kebijakan dapat mengeluarkan stimulus bagi masyarakat.

"Kami dari industri juga merasakan kelas menengah-bawah ini daya belinya agak berat karena memang beberapa ada kenaikan harga. Di samping itu, banyak pengeluaran masyarakat yang harus ditanggung," jelas Adhi.

"Sementara kita berharap pemerintah bisa lebih fokus meningkatkan daya beli di kelas bawah ini, seperti BLT bisa ditingkatkan agar bisa menggairahkan pasar terlebih dulu," pungkasnya.

Dari gelaran Food Ingredients Asia Indonesia di Jiexpo, Jakarta, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito mengakui industri makanan dan minuman berperan penting pada perekonomian nasional. Sektor tersebut mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024, yakni 5,53%. Hal itu membuat industri pangan berkontribusi 40,33% di industri nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Itu menjadikannya sebagai sub-sektor dengan kontribusi PDB terbesar," ujarnya. (E-2)